Manajemen Aset Barang Milik Daerah (BMD) Studi Kasus Kenderaan Operasional di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

Selvi Pambi[1], Widya Kurniati Mohi[2], Srihandyani Suprapto[3]
[12]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo
[3]Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Gorontalo,Indonesia
Email : selvipambi@gmail.com

Abstract

This research aims to obtain an overview of BMD Asset Management, Case Study of Operational Vehicles at the Health Service of Bone Bolango District. The research method uses a qualitative research type with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interviews with several informants and observation as well as recording secondary data related to the research problem. The results of the research concluded asset management of the regional property was not optimal as indicated by the indicators: 1) Asset planning was by standards and planning was carried out by identifying the needs of the Bone Bolango District Health Service; 2) In Asset Organizing, structured according to the organizational system or Bone Bolango District Health Service; 3) The briefing has not gone well, because the use of assets has not been recorded in the inventory; 4) Meanwhile, supervision has not been running well, due to lack of asset maintenance, including lack of vehicle maintenance, resulting in damage and lack of maintenance of STNK extensions.

Keywords: Asset; Management; BMD

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran tentang Manajemen Aset BMD Studi Kasus Kenderaan Operasional Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah informan dan observasi serta pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa manajemen aset barang milik daerah belum optimal ditunjukkan dengan indikator : 1) Perencanan aset, sudah sesuai dengan standard dan perencanaan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan daripada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango; 2) Pada Pengorganisasian Aset, terstruktur sesuai dengan sistem organisasi atau Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango;3) Pengarahan belum berjalan dengan baik, karena penggunaan aset belum tercatat dalam inventarisasi; 4) Sedangkan Pengawasan belum berjalan dengan baik, karena kurangnya pemeliharaan aset baik kurangnya perawatan kenderaan sehingga mengakibatkan kerusakan dan kurangnya pemeliharaan perpanjangan STNK

Kata kunci: Aset; Manajemen; BMD

PENDAHULUAN

Saat ini pengelolaan aset atau Barang Milik Daerah menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik efektif, efesien serta akuntabilitas publik. Artinya upaya dalam melakukakan pengelolaan barang milik darah secara baik merupakan salah satu penekanan pada barang milik daerah yang dimiliki dan dikelola. Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling penting yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah juga merupakan suatu potensi eknomi, sebab apabila dikelola denga baik maka akan memberikan kontribusi bagi pemerintah serta menunjang peranan pemerintah daerah sebagai pemberi layanan untuk kepentingan publik atau masyarakat.

Semakin meningkatnya tugas-tugas pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat terhadap sarana pelayanan yang beragam dan memuaskan publik dan mensejahterakan masyarakat maka perlu adanya kesiapan sarana dan prasarana pendukung yang siap setiap saat dalam keadaan baik dan berdaya guna. Barang Milik Daerah/ aset sebagai salah satu unsur krusial dalam rangka penyelenggaraan pelayanan, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan aturan dan azas pengelolaan barang milik daerah. Selain itu, perlunya memahami peraturan lain bagi setiap pengelola barang milik daerah demi terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah juga diperlukan adanya persamaan tujuan dan langkah menyuluruh dari elemen terkait pengelolaan barang milik daaerah (Basri, 2021; Manurung, 2019).

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang tentang perbendaharaan Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD pada dasarnya di gunakan untuk penyelenggaran tugas pokok dan fungsi kementrian negara/lembaga/SKPD. Dalam rangka untuk menjamin tertib dalam penggunaan, pengguna barang harus melaporkan kepada pengelola barang atas Barang Milik Daerah yang diperoleh untuk ditetapkan statusnya. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan kebutuhan dan penggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemangamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Gerriyent et al., 2021; Maulidiah, 2017)

Pada saat melalukan perencanaan kebutuhan dan penganggaran hendaknya memperhatikan kebutuhan sesuai dengan situasi yang ada agar tidak terjadinya pemborosan keuangan daerah. Pengadaan dilakukan setelah dilakukan perencanaan ataupun penganggaran. Penggunaan barang milik daerah perlu mengikuti mekanisme dan pemakai atau pengguna harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab atas barang milik daerah yang digunakan. Kemudian pemeliharaan dan pengamanan juga perlu dilakukan karena jika aset menjadi terbengkalai dan tidak terawat akan menjadi pemborosan karena biaya pemeliharaan dan perawatan yang dikeluarkan akan semakin besar dan tinggi. Selanjutnya penilaian dilakukan pada saat barang milik daerah/aset dalam masa waktu tertentu. Pemindah tanganan adalah perubahan status kepemilikan aset. Kemudian pemusnahan merupakan aktivitas

menghapus aset dari data inventaris. Penatausahaan dan pembinaan menjadi kegiatan yang esensial karena tidak setiap kali terjadi permasalahan aset disebabkan hal tersebut. Pengawasan dan pengendalian biasanya dilaksanakan dengan pengembangan sistem informasi manajemen barang milik daerah/asset (Khaerunnisa & Hoerudin, 2022).

Pengelolaan barang milik daerah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, tapi dalam pelaksanaan pengelolaannya sering kali terdapat berbagai permasalahan. Adapun permasalahan manajemen atau pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango seperti pemeliharaan aset, penatausahaan dan penggunaan yang belum sesuai dengan azas pengelolaan aset atau barang milik daerah.

Pada pemeliharaan aset terdapat permasalahan tentang perawatan kenderaan Dinas yang tidak sesuai dengan jadwal perawatan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan banyak kenderaan Dinas yang tidak berfungsi karena rusak ringan maupun berat. Kemudian pajak kenderaan Dinas yang sudah jatuh tempo sampai dengan bertahun-tahun berarti azas penatausahaan yang belum berjalan dengan baik, seharusnya azas ini yang paling penting sebagai dasar hukum pengelolaan barang milik daerah. Pengamanan dan pemeliharaan perlu dilakukan karena jika aset menjadi terbengkalai dan tidak terurus akan menjadi pemborosan karena biaya pemeliharaan dan perawatan yang dikeluarkan akan semakin besar. Penilaian dilakukan pada aset daerah dalam periode waktu tertentu. Pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan dan memelihara aset sesuai dengan aturan dan harus dimanfaatkan secara optimal.

Selanjutnya pengawasan dalam penggunaan aset masih belum berjalan sesuai dengan harapan yakni pergantian pengguna kenderaan Dinas tidak diketahui oleh pengurus barang, sehingga penggunaan kenderaan Dinas sulit untuk diawasi. Hal tersebut kerap kali terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango. Penatausahaan dan pembinaan menjadi kegiatan yang penting dilakukan karena kerap kali permasalahan aset karena hal tersebut. Ketidaktertiban administrasi dan inventarisasi aset menjadi salah satu masalah utama yang kerap terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa manajemen atau pengelolaan barang milik daerah/aset tersebut telah berjalan, tetapi belum terlaksana sesuai dengan harapan. Dalam pengelolaan kendaraan Dinas dibutuhkan komitmen dan kesadaran dari sumber daya manusia. Perlunya pengetahuan akan prosedur pengelolaan kendaraan Dinas yang berlaku dan selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang sering kali berubah.

Beberapa riset terdahulu terkait tema penelitian ini sudah ditulis oleh beberapa penulis sebelumnya seperti yang ditulis oleh (Daulay, 2019), yang berjudul Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Dalam penelitiannya menunjukan bahwa sistem pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan Permendagri No 19 tahun 2016, dan sesuai dengan PSAP No 07 tentang aset daerah. Dalam sistem pengelolaan terdapat kendala di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Yaitu dari segi sumber daya manusia yang kurang baik dalam mengelola, Dari sistem inventarisasi dan pelabelan barang yang tidak dilakukan pada tahun 2016 sampai saat ini. Hal ini karena sumber daya

manusia yang belum memadai mengenai inventarisasi barang. Barang yang belum terinventarisasi dengan baik, berupa peralatan kantor di gedung-gedung atau instansi pemerintah, banyak peralatan kantor yang belum dibuat kartu inventarisasinya, sehingga banyak mengalami kendala. Dalam sistem penganggaran yang menjadi kendala yaitu anggaran pada tahun berikutnya seharusnya sudah dapat dianggarkan pada tahun sebelumnya agar kegiatan yang dilakukan untuk tahun berikunya tidak menjadi kendala bagi Dinas pendidikan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Azmi & Sari, 2022), yang berjudul Manajemen Barang Milik daerah dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Provinsi X. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Perencanaan dan Pengawasan dan Pengendalian berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset, sedangkan variabel Identifikasi BMD berpengaruh negatif. Inventory BMD tidak berpengaruh terhadap optimalisasi manajemen aset.

Dari 2 penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian ini dimana dari segi masalah peneliti mengangkat beberapa identifikasi masalah yakni Pemeliharaan kenderaan Dinas yang tidak sesuai dengan jadwal perawatan sehingga banyak kenderaan yang tidak berfungsi dan rusak; selanjutnya kurangnya perhatian pengguna terhadap pajak kenderaan Dinas sudah jatuh tempo selama bertahun-tahun dan penggunaan kenderaan Dinas yang tidak tercatat sehingga sulit untuk diawasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator manajemen menurut G.R. Terry (2010) yang terdiri dari perencanaan; pengorganisasian; pengarahan serta Pengawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena tujuannya mengungkapkan dan menggambarkan fakta-fakta mengenai bagaimana Manajemen Aset Barang Milik Daerah (BMD) Studi Kasus Kenderaan Operasional di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

Adapun sumber data dalam penelitian ini dari data primer dan sekunder. Data primer diambil dari data yang diambil langsung dari beberapa informan antara lain: Kepala Dinas Kesehatan Bone Bolango; Sekertaris Dinas Kesehatan Bone Bolango; Bendahara Aset; Pegawai Aset dan Pengguna Aset 3 orang.

Selanjutnya data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen terkait dengan kebutuhan penelitian seperti artikel jurnal, artikel prosiding, buku, dokumen peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dengan beberapa tahapan yakni Reduksi data (Data Reduction), Menampilkan Data (Data Display) dan Verifikasi data (Data Verification).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Penelitian berada di Dinas Kesehatan KIabupaten Bone Bolango yang beralamat di Jalan Kesehatan Nomor 24, Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo 96129

Adapun permasalahan utama yang hendak penulis sajikan dalam pembahasan ini yaitu tentang bagaimana manajemen aset barang milik daerah (BMD) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.

Untuk melihat kajian ilmiah, tentang manajemen aset barang milik daerah (BMD) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango. Dibutuhkan suatu pendekatan teori, untuk itu teori yang digunakan oleh peneliti bersumber dari Indikator Pengelolaan Menurut (Terry, 2010) sebagai berikut :

1. Perencanaan (Planning)

Menurut George R Terry Perencanaan adalah proses memikirkan dan mengatur kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Perencanaan melibatkan penciptaan dan pemeliharaan operasi organisasi tertentu. Proses pemikiran ini penting untuk penyempurnaan tujuan dan integrasinya dengan rencana lain.

Kegiatan awal yang dilakukan dalam manajemen aset barang milik daerah adalah perencanaan. Dalam merencanakan sistem manajemen aset kita tidak boleh secara asal merencanakannya, tetapi ada prosedur yang harus kita pahami dan kita jalani. Kita harus melihat dulu kondisi dan kebutuhan aset yang diperlukan.

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa perencanaan dilakukan melalui mekanisme mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten bone Bolango dan sudah sesuai dengan standar daripada organisasi.

Menurut peneliti semua kegiatan dan tindakan manajerial didasarkan atau disesuaikan dengan rencana yang sudah ditetapkan. Rencana menentukan ke mana organisasi dan kegiatan-kegiatan akan diarahkan atau direncanakan. Ini berarti atau maksud dari tiap rencana dan semua rencana adalah membantu pencapaian tujuan organisasi.perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian menurut Geoge Terry merupakan proses menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang dalam kegiatan-kegiatan ini, dengan menetapkan faktorfaktor lingkungan fisik yang sesuai, dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan. Pengorganisasian bertujuan untuk membangun struktur organisasi yang efektif sesuai dengan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh karyawan dalam organisasi tersebut.

Dari segi pengorganisasian ini kegiatan utama adalah pembagian komponen kegiatan kedalam kelompok atau unit, kemudian pembagian tugas manajer, dan penetapan wewenang kelompok atau unit.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara sebelumnya bahwa manajemen aset barang milik daerah sudah trstruktur sesuai dengan komponen daripada Dinas terkait begitupun dengan pengadaan aset kenderaan terdaftar sesuai kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango. Sama halnya dengan temuan peneliti dilapangan, untuk pengelolaannya sudah terstruktur sesuai dengan sistem yang ada.

Pengorganisaian dari segi wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi. Dalam pengorganisasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango dimana sudah adanya pemberian wewenang kepada setiap bagian untuk melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Walaupun yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola Aset adalah bagian set sendiri tetapi untuk menjalankan

pengelolaan tersebut sudah dijalankan oleh bagiannya masing-masing.

Rekomendasi peneliti dalam indikator ini meskipun penempatan sudah sesuai dengan bidangnya pegawai, pihak instansi harus memperhatikan kualitas dan kuantitas daripada kinerja pegawai agar dapat di identifikasi pegawai yang layak diberikan apresiasi ataupun reward, sehingga dapat memotivasi pegawai tersebut bekerja. Kemudian untuk pemenuhan pegawai, harus di seleksi sesuai kebutuhan puskesmas Bulango.

3. Pengarahan (Directing)

Setelah adanya perencanaan dan pengorganisasian dalam manajemen sebuah organisasi, kemudian tahap selanjutnya dilakukan pengarahan dimana pengarahan sendiri mencakup kegiatan yang dilakukan pimpinan atau manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan manajemen aset di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango pengarahan merupakan hal penting dari setiap kegiatan yang dilakukan pihak terkait untuk menjalankan manajemen barang milik daerah khusunya aset kenderaan operasional tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penggunaan aset belum tercatat dengan baik Hal ini mengakibatkan kendaraan Dinas operasional yang dikelola oleh Dinas cenderung tidak optimal dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Begitupun dengan temuan peneliti dilapangan bahwa inventarisasi barang tidak dilakukan dengan baik oleh pengelola aset. sehingga laporan barang dari setiap Pengguna/Kuasa sering mengalami keterlambatan.

Bila dilihat dari hal tersebut, pengarahan sangat dibutuhkan agar pelaksanaan manajemen aset kenderaan operasional dapat berjalan, ini semua agar tidak adanya kelalaian tugas dari masing-masing bagian sehingga tugas pokok dan fungsi yang diberikan dapat dijalankan dengan baik karena setiap pihak merasa diperhatikan oleh atasan dan merasa memiliki tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Dalam hal ini pengarahan yang dilakukan dalam manajemen aset kenderaan operasional belum optimal

4. Pengawasan (Controling)

Pengawasan dilakukan untuk mengukur dan mengoreksi kinerja untuk memastikan bahwa tujuan instansi dan rencana yang dirancang untuk mencapainya tercapai. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan penyimpangan dari standar dan memastikan bahwa tujuan organisasi yang ditetapkan tercapai dengan cara yang diinginkan. Menurut Hanry Fayol (Harahap, 2011) pengawasan merupakan pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, insstruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Pendapat diatas diperkuat oleh William H (Harahap, 2011) bahwa pengawasan adalah tidakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Hal tersebut bertujuan untuk mengvaluasi dan mengetahui tindakan atau perbaikan apa saja yang akan dilakukan agar supaya segala sesuatu atau kegiatan nanti dapat terlaksana dengan baik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan juga guna menilai keberhasilan manajemen suatu organisasi dengan dilakukannya kegiatan pengawasan dimana melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan - penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki agar tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada berbagai cara untuk

mengadakan perbaikan, termasuk merubah rencana dan bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas-tugas atau merubah wewenang, tetapi seluruh perubahan tersebut dilakukan melalui manusianya. Karena dengan pengawasanpun dapat menjadi penilaian sejauh mana keberhasilan manajemen suatu organisasi. Selain itu untuk pangawasan juga dilakukan dengan melihat sejauh mana keberhasilan manajemen pemeliharaan aset Dinas kesahatan Kabupaten Bone Bolango.

Jadi berdasarkan uraian hasil wawancara disimpulkan bahwa kurangnya pemeliharaan aset yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango baik dari pengelola maupun pengguna aset. Proses pemeliharaan seperti pengelola harus selalu mengingtakan pengguna kenderaan dalam perpanjangan STNK. Sedangkan temuan peneliti dilapangan bahwa kurangnya pengawasan pada perawatan aset dalam hal ini perawatan kenderaan yang kurang diperhatikan oleh pengelola aset.

Kemudian menyangkut legal audit sebagai lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Selanjutnya, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset. Masalah yang sering dihadapi dalam legal audit, menyangkut status penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain-lain. Harunsya sebuah pengukuran keberhasilan manajemen aset tersebut dapat dijadikan sebagai pengontrolan dan bahan evaluasi bagi pihak terkait dimana untuk pengelolaan aset kenderaan operasional belum dilakukan dengan optimal.

PENUTUP

Simpulan

Manajemen pemeliharaan aset Dinas kesahatan Kabupaten Bone Bolango dapat disimpulkan bahwa pada Perencanan aset, sudah sesuai dengan standard dan perencanaan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan daripada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango; untuk pengorganisasian Aset, terstruktur sesuai dengan sistem organisasi atau Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango; Pengarahan belum berjalan dengan baik, karena penggunaan aset belum tercatat dalam inventarisasi, begitupun Pengawasan belum berjalan dengan baik, karena kurangnya pemeliharaan aset baik kurangnya perawatan kenderaan sehingga mengakibatkan kerusakan dan kurangnya pemeliharaan perpanjangan STNK

Saran

Adapun beberapa rekomendasi terkait hasil riset dalam paper ini ialah Manajemen aset perlu di perbaiki oleh pihak terkait; sumber daya manusia / pegawai aset perlu diberikan bimbingan/pelatihan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola asset, serta pengguna aset perlu diberikan perhatian dalam menggunakan aset

DAFTAR PUSTAKA

Azmi, F., & Sari, Y. (2022). Manajemen Barang Milik daerah dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Provinsi X.

Bahar, A. (2018). Analisis pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Kecamatan Mappakasunggu. Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 24.

Basri, H. (2021). Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1).

Daulay, C. F. (2019). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Gerriyent, G., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Bappeda Kota Binjai Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance. Jurnal Ilmiah Metadata, 3(3), 1047–1071.
Harahap, S. S. (2011). Analisis kritis atas laporan keuangan.
Hasibuan Malayu, S. P. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Khaerunnisa, F., & Hoerudin, C. W. (2022). Pengelolaan kendaraan Dinas dalam mewujudkan tertib administrasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah, 4(2), 2714–8130.
Manurung, M. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Batam. Prodi Administrasi Negara.
Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset sebagai wujud reformasi birokrasi di daerah. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 3(1), 233–242.
Rudianto. (2009). Penganggaran. Erlangga.
Terry, G. R. (2010). Prinsip - Prinsip Manajemen. Bumi Aksara.